

ABSTRAK

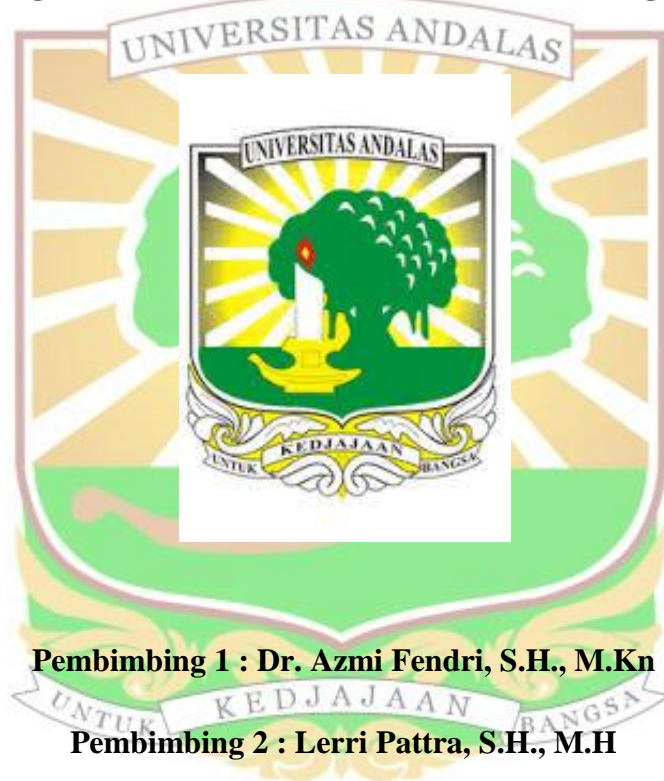
PENYEDIAAN TAMAN KOTA OLEH PEMERINTAH KOTA PADANG

Oleh :

IQBAL PAHLAWAN BOROTAN

13101112090

Program Kekhususan : Hukum Administrasi Negara



Pembimbing 1 : Dr. Azmi Fendri, S.H., M.Kn

Pembimbing 2 : Lerri Pattra, S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2017

PENYEDIAAN TAMAN KOTA OLEH PEMERINTAH KOTA PADANG
(Iqbal Pahlawan Borotan, BP 1310112090, Hukum Administrasi Negara (PK VIII), 61 halaman, 2017)

Pembimbing Dr. Azmi Fendri, SH., M Kn dan Lerri Pattra, SH.,MH

ABSTRAK

Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi “Bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.” memunculkan suatu pemikiran bahwa bahwa kemakmuran rakyat menjadi hal yang utama dalam pemanfaatan dan penataan tata ruang kota. Kota Padang sendiri merupakan kota yang sedang giat melakukan pembangunan di segala bidang, termasuk mengenai pembenahan tata kota, masalah taman kota yang ada di Kota Padang pada khususnya, memerlukan penanganan secara struktural melalui berbagai kajian dan kebijakan mengingat taman kota merupakan sebagai media komunikasi warga kota. Penyediaan taman kota di Kota Padang hanya memenuhi aspek ekologis dan estetika, sedangkan aspek sosial budaya belum terpenuhi. Berdasarkan hal tersebut yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : (1) Bagaimana penyediaan taman kota oleh Pemerintah Kota Padang, (2) Apa kendala dalam penyediaan taman kota oleh Pemerintah Kota Padang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *yuridis empiris* dengan analisis deskriptif. Dari hasil penelitian yang dilakukan diketahui bahwa, Taman Kota yang ada di Kota Padang berjumlah 44 buah dan mempunyai luas total 70,495 M² telah memenuhi fungsi taman dalam hal ekologis dan estetika, tetapi jika dikaji jumlah dan luas taman kota berkaitan dengan fungsi sosial budaya, maka jumlah tersebut jelas kurang dari kebutuhan yang ada pada masyarakat, yaitu sebagai tempat rekreasi media komunikasi antar warga kota serta menggambarkan ekspresi budaya lokal. Kendala yang dihadapi Pemerintah Kota dalam melakukan penyediaan taman kota bersifat *yuridis* dan *non yuridis*. Kendala *yuridis* yaitu tidak adanya sanksi bagi masyarakat yang melakukan perusakan taman kota, sedangkan kendala non yuridis yaitu kurangnya partisipasi masyarakat dalam penyediaan taman kota, serta kurangnya data mengenai pemanfaatan taman kelurahan dan kecamatan.

Kata Kunci : Penyediaan, Taman kota, Pemerintah Kota Padang.